

**ANALISIS PENERAPAN *IT GOVERNANCE* MENGGUNAKAN
COBIT FRAMEWORK DAN *SARBANES OXLEY* DALAM
MENDUKUNG *CORPORATE FINANCIAL
PERFORMANCE* (STUDI KASUS
PADA PT. TELKOM)**

Mutia Apriyanti Hamsir

(mutia_aprianti@yahoo.co.id)

Memem Suwandi

(memensuwandi@yahoo.com)

Muhammad Sapril Sardi Juardi

(Sapril.sardi@uin-alaududin.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *IT Governance* dengan *COBIT* dan *Sarbanes Oxley* dapat mendukung *corporate financial performance*, untuk mengetahui penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik menurut *COBIT* dan untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley* terhadap *IT Governance* sehingga dapat mendukung *corporate financial performance*. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena berpatokan akan beberapa kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Telkom telah menggunakan *IT Governance* yang sudah terkontrol langsung dari kantor pusat, sebagai pendukung dalam pelaksanaan kinerja perusahaannya. Telkom tidak hanya menggunakan *COBIT* dalam pelaksanaan tata kelola perusahaannya, namun juga menggunakan *COSO*. Pelaksanaan *Sarbanes Oxley* pada Telkom, yang dijadikan sebagai standar akan akuntabilitas pelaporan keuangan, pengendalian internal serta pengauditan. Serta sistem *hotline* pada perusahaan yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat banyak terutama Investor.

Keyword: *IT Governance*, *Sarbanes Oxley*, *COBIT* dan Pengendalian Internal

ABSTRACT

This study aims to know the implementation of IT Governance with COBIT and Sarbanes Oxley can support corporate financial performance, to know the implementation of good information technology according to COBIT and to know the application of Sarbanes Oxley to IT Governance so as to support corporate financial performance. The research used case study research approach, using

qualitative method. This study uses a case study approach, because it is based on some cases that have occurred before. Data collection is done through interview and field observation. The results in this study indicate that Telkom has been using IT Governance that has been controlled directly from the head office, as a supporter in the implementation of the company's performance. Telkom not only uses COBIT in its corporate governance practices but also uses COSO. The implementation of Sarbanes Oxley on Telkom, which serves as a standard for accountability of financial reporting, internal control and auditing. As well as the hotline system in the company which would be very profitable for the company and the public, especially investors.

Keyword: *IT Governance, Sarbanes Oxley, COBIT and Internal Control*

A. LATAR BELAKANG

Beberapa entitas bisnis baik kecil ataupun besar melihat bahwa dengan menggunakan Informasi Teknologi yang selanjutnya disebut *IT* dapat membantu proses bisnis menghasilkan sesuatu yang berguna (Budiono, 2010: 46). Awalnya *IT* hanya dipergunakan dalam hal proses hitung-menghitung, namun seiring perkembangan waktu, teknologi dan dorongan agar dapat mempermudah proses entitas bisnis maupun instansi-instansi, maka *IT* sekarang digunakan untuk mempermudah berbagai proses bisnis (Setiawan, 2010: 219). *IT* dapat mempermudah entitas bisnis/instansi agar dapat menggapai visi dan misi dalam usahanya.

Kinerja merupakan tergapainya sebuah tujuan akan aktivitas atau pekerjaan tertentu agar dapat tercapainya tujuan entitas yang dapat dilihat dengan adanya standar. Alat-alat analisis keuangan diperlukan guna melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan (Wati, 2012: 2). Penilaian kinerja perusahaan memiliki tujuan agar dapat mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja *non financial* dan *financial* adalah dua hal yang menjadi pengukuran perusahaan (Gozali, 2012: 40).

Kemajuan *IT* sekarang ini telah menjadi suatu keperluan yang begitu penting pada hampir semua entitas bisnis baik itu pada instansi pemerintahan maupun swasta sebagai pendukung untuk dapat mengefektifitas serta mengefisiensi proses kinerja, agar hal tersebut dapat terpenuhi suatu perusahaan membutuhkan suatu pengelolaan *IT* yang sesuai, sehingga manfaat *IT* dapat lebih memiliki manfaat bagi kelangsungan perusahaan (Hakim dkk., 2014: 105). Dermawan dkk. (2012: 3) menjelaskan bahwa *control objective for information and related technology* yang selanjutnya disebut *COBIT* dapat digunakan sebagai alat untuk mengefektifkan implementasi *IT*

Governance, yakni sebagai pedoman manajemen dengan menggunakan semua domain yang ada pada *COBIT*.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada salah satu BUMN di Indonesia yakni Telkom karena telah menerapkan dan mengimplementasikan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) serta *Sarbanes Oxley Act* yang selanjutnya disebut *SOA* sebagai *standard compliance and corporate governance* yang baru serta menuntut transparansi dan keterbukaan untuk investor maupun publik. PT. Telkom pernah mengalami keterpurukan dalam hal pelaporan keuangannya, namun sekarang Telkom merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang telah *listing* di *New York Securities Exchange* yang kemudian dapat disebut *NYSE* dan telah menerapkan *SOA*. Dengan menerapkan *SOA*, Telkom kini telah berhasil menyajikan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.

Karena Telkom telah berhasil dalam penggunaan *SOA* sebagai *standard compliance and corporate governance* sehingga harapan bagi perusahaan lain, bahwa Telkom ini dapat menjadi pelopor BUMN maupun perusahaan swasta lain agar dapat mengembangkan *Financial Reporting Governance* dan pengendalian internal berbasis *SOA* sebagai kesadaran bagi entitas untuk melaksanakan praktik yang sehat. *SOA* menawarkan suatu standar audit yang lebih komprehensif, transparan dan akuntabel baik kepada *investor* maupun publik sehingga kecurangan akan laporan keuangan dapat dihindari sehingga tingkat tindak pidana korupsi juga bisa dihindari. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan dari penerapan *SOA* ini.

Hingga saat ini, komisi pasar bursa Indonesia belum mengadopsi peraturan ini untuk diterapkan pada perusahaan yang sahamnya sudah diperdagangkan di pasar bursa dalam negeri. Dengan mengacu kepada pengalaman Amerika Serikat, apalagi mengingat keterpurukan perekonomian Indonesia salah satunya disebabkan oleh buruknya *corporate governance* dan semakin banyak perusahaan Indonesia *go public* di dalam maupun luar negeri, sudah seyogyanya pihak-pihak yang berkompeten seperti DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ikatan Akuntan Indonesia segera membuat atau mengadopsi undang-undang dan peraturan yang serupa dengan *SOA*. *SOA* juga dapat diterapkan pada perusahaan *non listing* meskipun pada dasarnya diterapkan pada perusahaan *listing* (Nourayi dkk., 2012: 465).

B. TINJAUAN TEORETIS

1. *Stakeholder Theory*

Perkembangan bisnis sekarang ini menuntut perusahaan agar lebih memerhatikan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham. Karena hal tersebut, selain merupakan tuntutan etis, juga diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomi serta menjaga perkembangan bisnis perusahaan. Maka dari itu keterkaitan hubungan antara perusahaan bersama seluruh pemangku kepentingan tersebutlah, teori *stakeholder* kemudian dikembangkan (Djaddang dan Lysandra, 2015: 84). PT. Telkom disini dituntut untuk lebih memperhatikan para pemangku kepentingan seperti masyarakat yang menjadi wadah bisnisnya. Dalam penelitian Ekasari dan Christine (2012: 197) menyatakan bahwa *stakeholder* memiliki pengaruh yang cukup besar serta perusahaan tidak dapat terlepas dari para pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung sebab mereka dapat mempengaruhi penggunaan sumber-sumber keuangan yang digunakan perusahaan. Telkom sampai sekarang ini tidak akan bisa bertahan bila tidak memerhatikan kebutuhan serta keinginan para pemangku kepentingan.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *stakeholder theory*. Teori *stakeholder* lebih memerhatikan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Dalam pandangan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki *stakeholders* bukan sekedar *shareholder*. Kelompok-kelompok '*stake*' tersebut meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Standford Research Institute (RSI)*. Hingga Freeman mengembangkan eksposisi teoritis mengenai *stakeholder* ditahun 1984 dalam karyanya yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Freeman dan mcvea (2001: 4) mendefinisikan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

2. IT Governance

IT Governance adalah bagian penentu atas kesuksesan pengaturan perusahaan atau institusi. Berdasarkan dari standar efisiensi dan efektivitas perbaikan pengukuran yang ada kaitannya dengan proses entitas bisnis. Dengan adanya *IT Governance*, entitas bisnis bisa saja dengan mudah untuk mendapatkan keunggulan terhadap informasi, keuntungan yang maksimum, modal, peluang serta keunggulan kompetitif dalam bersaing (Setiawan, 2010: 223).

Perusahaan yang bergerak dibidang informasi, seharusnya perusahaan ini selalu berusaha untuk memanfaatkan penggunaan

teknologi informasi untuk pengelolaan perusahaannya baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan. Jaringan *IT* dapat mengintegrasikan seluruh pengoperasian jaringan semua infrastrukturnya seperti alat produksi, sistem keuangan, logistik, sumber daya manusia hingga pelayanan kepada para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, vendor dan lainnya (Imancal, 2014: 15).

Kegiatan entitas bisnis baik swasta maupun pemerintahan memerlukan informasi dari aktivitas *IT* agar dapat menyatukan tujuan bisnis. Perencanaan strategis serta aktivitas *IT* merupakan penyebab kesuksesan perusahaan (Aviana, 2012: 68). Untuk dapat mengintegrasikan tujuan bisnis, aktivitas perusahaan/ institusi membutuhkan informasi dari kegiatan *IT* (Setiawan, 2010: 224).

3. *Sarbanes Oxley*

Sarbanes Oxley dikeluarkan sebagai respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti: *Enron, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen* dan *Xerox* yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam *the big five* seperti: *Arthur Andersen, KPMG* dan *PWC* (Rockness dan Joanne, 2005: 31). Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana *fraud schemes* berdampak sangat buruk terhadap pasar, *stakeholders* dan para pegawai (Jahmani dan Dowling, 2008: 57). Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari *Securities Exchange Commission (SEC)* dan beberapa *self regulatory bodies* lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap *Good Corporate Governance* yang kemudian disebut *GCG*. Saat ini, *corporate governance* dan pengendalian internal bukan lagi sesuatu yang mewah, karena kedua hal ini telah disyaratkan oleh undang-undang (Rapina dan eliezer, 2011: 104).

Perusahaan sangat perlu *Sarbanes Oxley* untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut tidak ada unsur *fraud* (manipulasi) di dalamnya khususnya pada perusahaan publik yang semestinya mempunyai kepercayaan terhadap masyarakat (Murdijaningsih, 2012: 5). *SOA* memiliki peranan yang penting dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dan juga kualitas dari audit (Lai, 2003: 4), namun secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa *SOA* memiliki dua tujuan utama yakni diantaranya: tujuan pertama *SOA* yakni menahan *eksekutif* yang

bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dimana, *SOA* telah membantu banyak untuk memperbaiki hukum yang ada pada perusahaan, karena sebelumnya digunakan untuk menghindari surat hukum. Tujuan kedua yakni memberikan sanksi berat untuk yang melanggar serta memaksa perusahaan agar dapat mematuhi dengan adanya ancaman hukum pidana.

4. *Cobit*

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) memberikan kebijaksanaan yang jelas dan praktik yang baik dalam tata kelola teknologi informasi dengan membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola resiko yang terkait dengan tata kelola teknologi informasi dengan cara memberikan kerangka kerja cara teknologi informasi dan panduan tujuan pengendalian terinci/*detailed control objective* bagi pihak manajemen, pemilik proses bisnis, pengguna dan juga auditor (Surbakti, 2012: 4). *COBIT* merupakan sekumpulan dokumentasi *best practice* untuk *IT Governance* yang dapat membantu auditor, pengguna (*users*) serta manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis *IT*.

COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu untuk identifikasi *IT controls issues*. *COBIT* bermanfaat bagi *users* sebab agar dapat memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang digunakan. Sedangkan bagi manajer memiliki manfaat untuk mengambil keputusan investasi dibidang *IT* serta infrastrukturnya, menyusun *strategic IT plan*, memutuskan *information architecture* serta keputusan terhadap *procurement* (pengadaan/ pembelian) mesin (Tambotih dan Latuperissa, 2014: 13).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi kasus. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya. Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian kualitatif menghasilkan deksripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting.

Penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT.Telkom. PT.Telekomunikasi (Telkom) Plaza Indonesia TBK Wilayah Telkom yang selanjutnya disebut WITEL Makassar yang bertempat di Jl. Balaikota No.02

dipilih karena merupakan salah satu BUMN yang berasal dari Indonesia yang telah menerapkan dan mengimplementasikan *Sarbanes Oxley Act (SOA)* sebagai *standard compliance and corporate governance* yang baru.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena berpatokan akan beberapa kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya pada PT. Telkom untuk menganalisa masalah yang pernah terjadi sebelumnya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi kasus. Riset ini akan menganalisis tentang *SOA* sebagai kegiatan lindung nilai atas manajemen risiko serta mengungkapkan proses pengaplikasian akuntansi pada PT. Telkom Makassar.

b. Sumber Data

Informan yaitu orang yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Rachmadi 2011: 132). Informan dipilih karena dianggap memiliki kompetensi dalam mengetahui operasional pada Telkom Makassar serta peraturan-peraturan yang ditetapkan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai informan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini berupa kata-kata dan gambar yang mampu mempercepat proses penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian *handphone*, kamera, alat tulis serta pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada informan yang dibuat berdasarkan pemikiran penulis sendiri serta mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang salah satunya dilakukan oleh Djaddang dan Lysandra (2014).

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan berdasarkan kepada jenis data yang diperoleh selama penelitian. Untuk jenis data yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara yang akan

dikembangkan. Proses analisis data dari hasil observasi dan wawancara ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

7. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data hanya digunakan dalam satu uji yang paling sesuai, yaitu validitas internal (kredibilitas). Uji validitas internal (kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. (Afiyanti, 2008) Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan 3 macam triangulasi yaitu: Triangulasi data, triangulasi teori dan triangulasi metode.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sarbanes Oxley terhadap IT Governance dapat mendukung Corporate Financial Performance

Kinerja dapat dilihat dari tergapainya suatu tujuan akan aktivitas atau suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang dapat dinilai dengan adanya standar. Upaya dalam penanganan para manajemen dalam menggapai tujuannya tidak lain yakni dengan melihat beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan lain yang telah sukses dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk menggapai tujuannya. PT. Telkom telah melakukan berbagai agar dapat mendukung kinerja perusahaannya, seperti yang dikatakan oleh Pak Wanto yang menjabat sebagai manajer keuangan di PT. Telkom wilayah Makassar bahwa:

“E... kalau Telkom ini, yah sudah... e... menggunakan standar yang sudah berbasis Tehnologi Informasi gitu dan semuanya sudah menggunakan aplikasi yang... secara *online*. Jadi, semua kegiatan yang ada di Telkom itu sudah berbasis *online*. Para e... karyawan-karyawan juga sudah dibekali pengetahuan yang sudah m... memadai dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berbasis online ini”. (Wawancara tanggal 14 September 2017, pukul 10:55 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Tata kelola perusahaan merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan kuasa oleh pemegang saham serta masyarakat untuk diberikan kepada dewan (*board*) dan manajer. Pada tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial bagi PT.Telkom, karena perusahaan menjadikan tahun 2015 sebagai tahun budaya penarapan prinsip dasar *GCG*. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wanto bahwa:

“E...kalau berhubungan dengan *GCG*, Telkom ini sudah mulai menerapkan *GCG* pada tahun 2015 sampai sekarang, nah dengan kami menggunakan prinsip-prinsip dasar *GCG*

sebagai budaya dalam menjalankan tugas-tugas operasional sehari-hari, kami ini e.... meyakini kualitas penerapan praktik terbaik *GCG* akan dapat mendukung kinerja perusahaan. Sehingga semua manfaat dari penerapan praktik terbaik *GCG* dapat kami rasakan gitukan, terutama naiknya nilai perusahaan dan e.... terpenuhinya harapan para pemangku kepentingan”. (Wawancara tanggal 14 September 2017, pukul 10:57 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Salah satu dasar penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Tujuan dari menganalisis laporan keuangan perusahaan, yaitu untuk menilai atau mengevaluasi suatu kinerja khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta menentukan strategi apa yang harus diterapkan pada periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai. *Corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*. Penerapan prinsip-prinsip *GCG* yang didukung dengan regulasi yang baik, diharapkan akan mencegah berbagai bentuk ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wanto, bahwa:

“Pengontrolan di kita itu e.... Sudah, sudah, sudah standarlah artinya udah, udah diterapkan yah karena semua itu ada, ada, kebijakannya. Apalagi, kita sudah menerapkan SOA. Misalkan, kita itu kan sudah sangat mudah gitukan mengawasi, yah karena itu tadi misalnya masalah datanya sudah, sudah di *publish*. Artinya, sudah mudah gitu tidak seperti jaman dulu yang masih manualan. Sekarang sudah basisnya komputer, *online* sudah terjamin gitu artinya sudah terukur, sehingga kontrolnya itu sudah, secara ini sudah terkontrol gitu lo. Dengan adanya apa itu, dengan adanya aplikasi yang sangat canggih misalnya. Itu secara operasional udah terkontrol gitu artinya, sudah ada batasan-batasan disitu. Misalnya anggaran, kalau melebihi yang dipake di anggarannya disitu sudah *budget*-nya sudah tidak bisa terpake dan tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana mau di ganggu gugat kan semuanya sudah terkontrol. Misalnya budgetnya itu satu dipake dua, itu sudah gak bisa. Yah kontrolnya yah itu sistemnya sudah kuat gitu”. (Wawancara

tanggal 14 September 2017, pukul 11:00 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Dalam hal pelaksanaan *GCG*, Telkom juga menggunakan *SOA* sebagai pengaturnya. Telkom menggunakan *SOA* disini, karena selain Telkom sebagai emiten yang tercatat dan diperdagangkan di *BEI* (Bursa Efek Indonesia) dan *NYSE* (New York Stock Exchange), maka selain mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pedoman Umum *GCG* Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan juga mematuhi *SOA* tahun 2002 serta peraturan *SEC* (*Securities and Exchange Commission*) lainnya dalam menerapkan *GCG*. Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Pak Wanto, Pak Safwan yang menjabat sebagai Manajer *Warroom* pada kantor Wilayah Makassar menyatakan bahwa:

“Kita harus konsisten menerapkan *SOA* ini, sebagai konsekuensi Telkom karena telah listing di New York *Stock Exchange*. Sebab sudah menjadi kewajiban bagi semua perusahaan yang telah *listing* disana untuk memenuhi *klausul* [perjanjian] yang ada di *SOA* itu, itu suatu kewajiban. Jadi, kita laksanakan. Dan itu sudah kita laksanakan sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang. Penerapan *SOA* ini sangat membantu perusahaan. Karena, dengan *SOA* ini kita bisa mengontrol bisnis perusahaan, kita juga sudah tau apa resiko-resiko yang bakal muncul ketika melaksanakan bisnis proses dan kita juga tau bagaimana mengontrol, supaya resiko tersebut bisa kita e...apa namanya? Bisa kita mitigasi, bisa kita kurangi timbulnya resiko tersebut”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul 10:44 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengontrolan di Telkom ini semuanya menggunakan sistem yang terkontrol langsung oleh kantor pusatnya mereka. Dan juga sebagai akibat karena mereka telah *listing* di *NYSE*. Jadi, mereka tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan tugasnya. Karena, semuanya sistem yang sudah mengatur alur jalannya kinerja perusahaan mereka.

2. Penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik menurut COBIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya internal *audit* telah menggunakan *Audit Management System* (*AMS*) yang merupakan sebuah sistem aplikasi untuk mendokumentasikan pelaksanaan audit berbasis risiko secara *online*. Peningkatan peran serta *Internal Audit* yang selanjutnya disebut *IA* dilakukan dengan

cara meningkatkan kualitas *assurance* atas operasional perusahaan melalui aktivitas *audit* maupun *non audit*. *Audit* dilakukan untuk memastikan bahwa risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi dapat diatasi melalui pengendalian internal yang efektif. Jika ditemukan ketidak efektifan pada pengendalian suatu proses bisnis dan atau risiko yang di luar kendali, maka dilakukan *substantive test*, yaitu pengujian lanjut objek audit guna mendalami akar permasalahannya. Selain itu, sebagai konsekuensi pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (*BEI*) maupun *New York Stock Exchange (NYSE)*, *IA* secara periodik melakukan pengujian dan audit terhadap efektivitas dan kecukupan pelaksanaan pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan sesuai standar *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)*. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wanto bahwa:

“Kalau tata kelolanya kan keuangan itu, apa namanya? E... itu, yah *finance collection*, itu kalau dilingkup Witel, Witel kelas satu yah.. itu jadi terbagi jadi dua bagian gitu. Ada manajer *collection and payment* ada manajer *finance*-nya itu sendiri, karena dalam pengelolaannya terbagi menjadi dua manajer yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Manajer *collection* itu sendiri yang mengelola tagihan m... termasuk upaya mereka dalam mencairkan beberapa tagihan yang kinerjanya dapat diukur dari penilaian atas pencarian itu sendiri. Kemudian manajer *finance* yah... mengelola masalah pembayaran internal dan eksternal. Yang internal itu meliputi pembayaran ke vendor kita sendiri, semua unit kita berikan sesuai dengan anggaran yang ada. Namun dalam pemberian anggaran juga, juga tidak sepenuhnya langsung diberikan e... tapi awalnya hanya diberikan panjar terlebih dahulu, setelah mereka membelanjakan anggaran maka harus dipertanggungjawabkan ke keuangan, lalu di keuangan diganti lagi, itu semua yah... sesuai dengan sistem yang berlaku saat ini di Telkom”. (Wawancara tanggal 28 September 2017, pukul 10:14 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Sebagai bagian dari Perusahaan yang punya komitmen tinggi terhadap keberhasilan *Good Corporate Governance*, *IA* memiliki peran penting dalam mekanisme *whistleblower* yang merupakan ranah Komite Audit dan *Executive Investigative Committee (EIC)*. Mekanisme *whistleblower* berfungsi untuk mengakomodasi setiap ‘pengaduan’ oleh karyawan untuk diteruskan kepada manajemen. Pada gilirannya, jika Komite Audit dan *EIC* menilai bahwa pengaduan perlu diselidiki lebih lanjut, *IA* akan mengambil peran

untuk menindak lanjuti sebagai bagian dari tugas audit. Dalam pelaksanaan auditnya berdasarkan yang dikemukakan oleh Pak Wanto, yakni:

“Audit itu...dia itu, auditnya itu dari pusat penunjukan langsung dari Telkom-kan. Jadi dia, tergantung dia kalumau ngambil sampling Makassar ini kebetulan ngambil sampling Makassar itu tidak semuanya sih, yang dia butuhkan ajah. Jadi, yah yang dia butuhkan kemudian dia *sample*-nya itu samplingnya itu dari sana, dari Bandung, dari Bandung kemudian mengirimkan data gitu yah sesuai dengan apa yang dia sampling kemudian kita yang anu. Kita yang respon, yah nanggapi yang apa itu? Yang menyampaikan masalah yang dia minta gitu. Tapi setelah itu mereka turun ngecek ke... masing-masing daerah. Biasanya dia itu, kalau sudah itu datanya dikumpul, dianalisa dia disana, setelah itu dia turun cek fisik, biasanya itu yang dia lakukan. Tapi ini, sementara ini baru minta permintaan. Kamarin itu kita kena Bank, Bank BRI yah, Bank BRI sama Banknya Mandiri. Jadi dia ngauditnya ini sudah sampe bulan Juli. Bulan Juli, nanti paling mereka nanti, apa itu namanya? Mereka pasti ngecek kesini. Kemarin datanya itu udah saya kirim”. (Wawancara tanggal 28 September 2017, pukul 10:19 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Untuk dapat memenuhi target Telkom memisahkan beberapa tanggung jawab yang berhubungan dengan *IT Governance* itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jafar Israil yang menjabat sebagai asisten manajer unit network bahwa:

“Ada sembilan Witel di KTI [Kawasan Timur Indonesia]. Salah satunya yah disini di Makassar di Jl. Balaikota yang dibawah pimpinan *GM* [General Manajer] dan dibantu oleh *AGM* [Asisten General Manajer]. Di... Witel Makassar ini ada, ada beberapa unit lagi yah... salah satunya yakni Unit *Network*, Unit *Finance*, Unit *Information System* dan Unit *ASO* [*Access Service Operation*]. Nah, *ASO* ini m... yang mengelola jaringan dari kantor ke pelanggan-pelanggan, data manajemen *maintenance* dan data manajemen itu sendiri. Itulah beberapa unit yang mengelola *IT*”. (Wawancara tanggal 25 Oktober 2017, pukul 10:24 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Prosedur dan pengendalian yang dilakukan Telkom mengacu pada *COSO Internal Control framework* dan *COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)*, khusus untuk pengendalian

internal di bidang Teknologi Informasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul Syukur yang menjabat sebagai Manager *Information System* (IS) atau biasa disebut *IS Operated Support* pada kantor telkom Wilayah Makassar bahwa:

“Tata kelola *IT* yah... di Telkom ini kita menerapkan *system provisioning* [proses penyediaan suatu layanan] bagi akuntan atau bagian keuangan, *IT Network*nya termasuk sekuriti *IT*. Kalau berbicara tentang penerapan program disini, kami ini juga merupakan sebagai *user* yah. Kami sebagai pelaksana disini, yakni operasional *support* sedangkan untuk selebihnya itu ada di *Regional* atau Pusat yang berada di Bandung. Masalah aplikasi, yah itu tadi semuanya itu dari pusat dan kami tinggal melaksanakan *IT Tools* saja, disini kami hanya *support and user* yang membimbing para pengguna pada unit-unit agar bisa melakukan proses *IT Tools* tersebut. Dan berhubungan pelaksanaan *COBIT* itu sendiri itu sudah ditetapkan oleh kantor *regional* sendiri, mulai dari *user access*, *user access matriks* itu semuanya dari pusat langsung. Disini *IT* bukan hanya sebagai *supporting* namun juga sebagai mitra dalam membangun dan mendukung kinerja perusahaan”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09:38 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Di dalam praktik yang diberikan oleh *COBIT*, diberikan langkah-langkah untuk menjamin pelayanan dan pem berian standar pengukuran untuk menilai ketika terdapat kesalahan dalam penggunaannya. Telkom ini telah menggunakan *IT Governance* sesuai yang berlaku umum yakni 11 *control objective* dari 4 domain antara lain:

a. *Domain Plan and Organise (PO)*

- 1) PO1: Pendefinisian Rencana Strategis Teknologi Informasi. Perencanaan strategis *IT* yang mengharuskan adanya pengelolaan dan pengarahan seluruh sumber daya *IT* yang tersedia agar sejalan dengan strategi dan prioritas bisnis harus terus dilakukan.
- 2) PO4: Pendefinisian Proses Teknologi Informasi, Organisasi dan keterhubungannya. Divisi *IT* pada Telkom harus menentukan keterampilan staf, fungsi, akuntabilitas, otorisasi, peraturan dan tanggungjawab serta pengawasan berdasarkan kebutuhan harus terus dilakukan.
- 3) PO7 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Proses ini menjelaskan bahwa penetapan, pemeliharaan dan memotivasi *workforce* yang kompeten untuk menciptakan dan

mengirimkan *service IT* pada tiap unit-unit pada Telkom. Hal ini dicapai dengan cara mengikuti praktik-praktik pendukung yang telah ditentukan dan disetujui, seperti pengangkatan karyawan, pelatihan dan evaluasi kinerja.

b. *Domain Acquire and Implement (AI)*

- 1) AI1: Mengidentifikasi Solusi Otomatis. Proses ini menjelaskan bahwa kebutuhan akan aplikasi atau fungsi baru yang memerlukan analisis sebelum memperoleh atau membuatnya, yang mampu digunakan untuk menjamin bahwa keperluan tiap unitnya akan terpenuhi di dalam pendekatan yang efektif dan efisien.
- 2) AI3: Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Pada Telkom sudah terdapat perencanaan infrastruktur teknologi ketika terjadi perubahan teknologi yang digunakan. Perusahaan menyadari pentingnya kebutuhan untuk mengatur infrastruktur teknologi. Pemeliharannya telah direncanakan dan terjadwal.
- 3) AI6: Mengelola Perubahan. Pada level ini, segala hal yang berkaitan dengan perubahan *IT* telah diatur dan ditentukan secara resmi. Manajemen juga menyadari perlunya melakukan pengaturan dan pengontrolan terhadap perubahan yang terjadi.

c. *Domain Deliver and Support (DS)*

- 1) DS1: Menetapkan dan Mengelola Tingkat Layanan. Pada proses ini, yang paling memenuhi adalah level 4 yaitu *Manageable and Measure*. Tingkat pelayanan di Telkom termasuk tinggi. Telah adanya pihak yang bertanggungjawab dalam mengatur tingkat pelayanan.
- 2) DS11: Mengelola Data. Pada proses ini yang paling memenuhi adalah level 5 yaitu *Optimised*. Kebutuhan untuk mengatur data sudah diakui dan disadari oleh perusahaan, sudah ada tindakan yang nyata dalam mengatur data. Prosedur pengaturan data ada, juga telah diketahui oleh seluruh staff dan telah didokumentasikan.

b. *Domain Monitor and Evaluate (ME)*

- 1) ME1: Mengawasi dan Mengevaluasi Kinerja Teknologi Informasi. Pada proses ini yang paling memenuhi adalah level 5 yaitu *Optimised*. Pengukuran fungsi telah sesuai dengan tujuan dan telah terdokumentasikan. *Monitor* kinerja *IT* sudah terstandarkan dan dikomunikasikan.
- 2) ME2 Mengawasi dan Mengevaluasi Kontrol Internal. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan standar dan kebijakan, keamanan informasi, kontrol dan perubahan kontrol

telah ditetapkan dalam persetujuan mutu layanan. Telah adanya peningkatan prosedur dan kebijakan.

- 3) ME4 Menyediakan Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada level ini, kepentingan dan kebutuhan pengelolaan *IT* telah dipahami oleh pihak manajemen, serta prosedur tata kelola berdasarkan standar dan didokumentasikan.

Telkom melakukan pengelolaan karyawan yang terintegrasi dan berbasis aplikasi digital. Melalui layanan *web-in-service* karyawan dapat menyampaikan pertanyaan, *request*, dan keluhan yang sedang dihadapi seputar pengelolaan *human capital* kepada tim *solver helpdesk* kapan pun dan dimana pun. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem *ticketing* untuk memantau *progres* penanganan keluhan yang diajukan. Telkom juga memberi wadah untuk menampung gagasan dan berbagi aspirasi kreatif maupun *feedback* seputar pengelolaan perusahaan.

3. Penerapan IT Governance dengan COBIT dan Sarbanes Oxley dapat mendukung corporate financial performance

Kinerja perusahaan dapat dilihat dengan terpenuhinya tujuan dari suatu entitas bisnis. Dimana, terpenuhinya suatu tujuan perusahaan tidak dapat dipungkiri bahwa pengendalian internal disini juga memiliki andil yang cukup besar didalamnya. Karena dengan pengendalian internal yang baik dapat menjamin keandalan laporan keuangan, yakni apabila diterapkan pada tingkat pengendalian (*level of control*): Tingkat pengendalian entitas (*Entity Level Control*), tingkat pengendalian transaksi (*Transactional Level Control*) dan pengendalian informasi teknologi (*IT Control*). Seperti yang dikatakan oleh Pak Jafar Israil bahwa:

“Tata kelola berbasis *IT* di Telkom bukan hanya operasionalnya yang menggunakan *IT*, tetapi *core [inti]* bisnisnya memang di bidang *IT*. Jadi, yah... tidak hanya pengelolaan bisnisnya saja tetapi juga pada bisnisnya itu sendiri yah... itu berbasis *IT*. Didalam mengelola operasional itu memang kita sejak dulu... yang berbasis teknologi sistemnya memang sudah *online*, tetapi belum sepenuhnya berbasis *IT* karena masih ada hal-hal yang harus dikelola secara manual namun secara umum kami sudah menggunakan *IT base*. Kalau tata kelola itu bukan bagian *networking* sini tap bagian *IS [information system]*. Yang paling bersinggungan dengan *COBIT* itu yah *IS*”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09:26 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Tingkat Pengendalian Entitas (*Entity Level Control*) pada telkom telah mengacu pada *COSO Internal Control framework* dan *COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)*, khusus untuk

pengendalian internal di bidang Teknologi Informasi itu sendiri. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Pak Wanto menjelaskan bahwa:

“Kontrol itu sangat penting sekali gitu...Apalagi penggunaan *COBIT* sangat membantu dalam pengontrolan. Dengan kontrol ini apa-apa gak bisa dilakukan secara... serampangan gitu yah... artinya harus terukur semua sehingga tentunya akan lebih efektif, akan lebih efisien gitukan terhadap perusahaannya”. (Wawancara tanggal 28 September 2017, pukul 10:21 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Sesuai ketentuan *SOA* 2002 *section* 406, Perseroan menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh *level* organisasi, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat kunci lainnya serta seluruh karyawan. Pemahaman dan upaya mengingatkan kembali kepada karyawan tentang tata nilai dan etika bisnis dilakukan melalui pengiriman materi sosialisasi dan sekaligus *assesment* yang dilaksanakan setiap tahun. Materi tersebut berkaitan dengan pemahaman *GCG*, etika bisnis, pakta integritas, *fraud*, manajemen risiko, pengendalian internal (*SOA*), *whistleblowing*, pelarangan gratifikasi, tata kelola *IT*, menjaga keamanan informasi dan hal-hal lainnya yang terintegrasi terkait dengan praktik tata kelola perusahaan. Upaya dimaksud dilakukan melalui program survei etika bisnis dengan populasi seluruh karyawan. Survei dilakukan secara *online*, melalui media portal/ intranet yang diakhiri dengan pernyataan kesediaan karyawan untuk menjalankan etika bisnis.

Pemahaman dan penerapan etika bisnis berikut hasil survei setiap tahun diaudit secara internal maupun eksternal melalui proses audit *SOA* 404 terkait dengan penerapan *control environment* sesuai kerangka kerja pengendalian internal *COSO* pada audit pengendalian internal tingkat entitas. Pelaksanaan *SOA* pada Telkom, sangat membantu perusahaan karena dapat mendukung kinerja keuangan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Safwan bahwa:

“Sudah menjadi suatu e... tadi seperti yang saya bilang sebagai kewajiban kita, sebagai konsekuensi dari e.... kita listing di... di apa namanya? Di New York. Kalau kita bicara tentang *stakeholder*-kan salah satunya adalah para *shareholder*. Para *shareholder* itu mengetahui kinerja perusahaan e... dari pernyataan-pernyataan kita yang tercatat atau yang kita laporkan lewat e... semua klousul-klousul yang ada di *SOA* itu”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul 10:48 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Penerapan *GCG* yang baik maka akan mengakibatkan kinerja keuangan juga menjadi baik. Hal ini menggambarkan bahwa manajemen

perusahaan menyadari manfaat jangka panjang dari penerapan GCG yaitu adanya dampak keuangan secara langsung seperti peningkatan laba bersih perusahaan dan akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sehat. SOA diterbitkan untuk memproteksi kepentingan investor dengan cara menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), *full disclosure*, dan akuntabilitas dalam perusahaan. Penerapan SOA ini menurut Pak Safwan yakni:

“Di Telkom ini kita memiliki proses bisnis, mulai dari pendapatan, beban, pajak, pengelolaan aset, sampai pada akhirnya *Financial Report*. Nah...semua itu kita identifikasi, prosesnya bagaimana, siapa yang melakukan, dilakukan menggunakan apa, kemudian resikonya seperti apa, kontrolnya seperti apa. Semuanya didefinisikan, semuanya dipetakan, semuanya dibuat. Untuk kemudian secara periodik dilakukan evaluasi, apakah bisnis proses tersebut bisa... kita laksanakan secara efektif atau tidak, kurang lebih seperti itu. Dan semua unit yang terlibat dalam proses, proses yang saya sebut diatas itu e... apa namanya? E...dimintai, dimintai semacam *evidence-nya* [bukti] untuk kemudian secara WITEL dipastikan bahwa kita sudah melakukan semua yang dipersyaratkan di SOA itu, dengan baik dan benar”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul 10:18 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).

Sebagai bagian dari *entity level control*, sejak tahun 2006 Telkom telah menerapkan *whistleblower program* yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindak lanjuti pengaduan dari karyawan Telkom Group dan dari pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sistem yang menampung pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan. Sejak tahun 2006, Telkom telah menerapkan *whistleblower program* yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindak lanjuti pengaduan dari karyawan Telkom Group dan dari pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

E. KESIMPULAN

1. Dengan adanya *IT Governance* akan sangat membantu Perusahaan dalam melakukan pengendalian. Telkom telah menggunakan *IT Governance* sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas perusahaannya. Pengelolaan *IT Governance* yang baik pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh dua bidang yakni: bidang pertama, yang tergolong masih baru yakni berfokus kepada tata kelola korporasi (*corporate*

governance) dalam perusahaan dan bidang selanjutnya yakni sistem informasi strategis (*strategic information system*). IT bukan hanya sebagai *supporting* namun juga sebagai mitra dalam membangun dan mendukung kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan kuasa oleh pemegang saham serta masyarakat untuk diberikan kepada dewan (*board*) dan manajer untuk dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.

2. Penerapan tata kelola perusahaan menjadi menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tingkat Pengendalian Entitas (*Entity Level Control*) pada telkom telah mengacu pada *COSO Internal Control framework* dan *COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)*, khusus untuk pengendalian internal di bidang Teknologi Informasi itu sendiri.
3. Porsi Hukum harus lebih berimbang dalam memperkarakan pihak-pihak yang bertanggung jawab (Komisaris, Direksi, Komite Audit,) apabila terjadi salah saji material, penyimpangan, bahkan manipulasi dalam Laporan Keuangan. Telkom telah menerapkan *Whistleblower system*, yang dalam *Sarbanes Oxley* itu sendiri disebut sistem *hotline* pada perusahaan. Yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat banyak terutama Investor. Kajian mengenai penyesuaian yang perlu dilakukan agar undang-undang tersebut sesuai dengan kondisi organisasi harus dilakukan dengan tetap menjaga agar tujuan pokok dari undang-undang tersebut dapat tercapai.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Yati. 2008. *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Keperawatan Indonesia. 12(2): 137-141.
- Budiono, Gatut. 2010. *Audit Kinerja Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan Unit Pembangkit Listrik Berbasis COBIT Domain*. Jurnal EECCIS. 6(1): 45-49.
- Dermawan, Real, F. Achmadi dan F. Samopa. 2012. *Model Tata Kelola Pengelolaan Jaringan di PT.X Menggunakan COBIT*. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XV. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Djaddang, Syahril, S. Lysandra dan M.A. Syam. 2014. *Penerapan Pengendalian Intern Berbasis Sarbanes Oxley Act dan*

- Keandalan Pelaporan Keuangan*. Economics & Business Research Festival. 1543-1566.
- Djaddang, Syahril dan S. Lysandra. 2015. *Model Pengendalian Internal Berbasis Sarbanes Oxley Act dan Keandalan Pelaporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 18(2): 81-106.
- Ekasari, Novita dan Y. Christine. 2012. *Pengaruh Social Responsibility Terhadap Profitabilitas PT.Telkom Tbk sebagai Pemenang CSR Award 2008*. Jurnal Akuntansi Akruar. 3(2): 196-208.
- Freeman, R. Edward dan J. Mcvea. (2001). *Strategic manajemen: A stakeholder approach*. CambridgeUniversity Press.
- Gozali, Nathalia. 2012. **Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan**. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. 1(4): 38-43.
- Hakim, Abdul, H. Saragih, A. Suharto. 2014. *Evaluasi Tata Kelola Informasi dengan Framwork COBIT 5 di Kementerian ESDM*. Journal of Information System. 10(2): 105-117.
- Imancal, Moncal. 2014. *Analisa Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT*. Artikel. <https://moncaimancal2.wordpress.com/2014/10/30/analisa-audit-tata-kelola-teknologi-informasi-menggunakan-framework-cobit/>. Di Akses pada tanggal 13 Agustus 2017. Pukul 21.25 WITA.
- Jahmani, Yousef dan W.A. Dowling. 2008. *The Impact of Sarbanes-Oxley Act*. Journal of Business & Economics Research. 6(10): 57-66.
- Lai, Kam Wah. 2003. *The Sarbanes Oxley-Act and Auditor Independence: Priliminary evidence from audit opinion and discretionary accruals*. Social Science Research Network Electronic Paper Collection. University of Hongkong, Hongkong.
- Murdijaningsih, Tjahjani. 2012. *Sarbanes Oxley Role in the Detections Financial Statement Fraud in Telkom to Support Good Corporate Governance*. Journal & Proceeding FEB ONSOED. 2(1): 1-15.
- Nourayi, Mahmoud M., L. Kalbers dan F. P. Daroca. 2012. *Impact of Corporate Governance and The Sarbanes Oxley Act on CEO Compensation*. The Journal of Applied Business Research. 28(3): 463-480.
- Rachmadi, Lesty J. Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rapina dan H. Eliezer. 2011. *Pencegahan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan oleh Eksekutif Perusahaan berdasarkan Sarbanes Oxley Act Section 302*. Dialogia Iuridica. 3(1): 101-129.

- Rockness, Howard dan Joanne R. 2005. *Legislated Ethics: From Enron to Sarbanes Oxley, the Impact on Corporate Amerika*. Journal of Business Ethics. 57(1): 31-54.
- Sarbanes Oxley Act Corporate Responsibility (SOA). 2002. *Public Law Congress*. New York: Securities and Exchange Commission (SEC).
- Setiawan, Herri. 2010. *IT Governance & Penggunaan COBIT Framework*. Jurnal Sistem Informasi. 2(2): 219-237.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Herison. 2012. *Managing Control Object for IT (COBIT) sebagai Standar Faramework pada proses pengelolaan IT Governance dan Audit Sistem Informasi*. Jurnal Teknologi Informasi. 7(9): 1-14.
- Tambotoh, Johan J.C. dan R. Latuperissa. 2014. *The Application for Measuring the Maturity Level of Information Technology Governance on Indonesian Government Agencies Using COBIT 4.1 Framework*. Intelligent Information Management. 6(1): 12-19.
- Wati, L.Monisa. 2012. *Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Manajemen. 1(1): 1-7.